

Pengaruh Penerapan Desentralisasi Fiskal Melalui PAD dan Transfer Pusat ke Daerah terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Periode 2008-2011

Oleh :

Nurfahmiyati

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pembangunan agar terbentuk negara yang maju dan memiliki masyarakat yang makmur dan sejahtera. Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan, pemerintah merubah sisten hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Desentralisasi dikenal dengan otonomi daerah ditetapkan oleh MPR sebagai wakil rakyat melalui ketetapan MPR RI nomor XV/MPR/1998, berdasarkan ketetapan MPR tersebut pemerintah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu (1). Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan (2). Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPPD) sebagai pengganti Undang-undang No.32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antar Daerah dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumahtangga sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah (provinsi), terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya

Alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

DAU (Dana Alokasi Umum) yang minimum 25% dari penerimaan dalam negeri, yang dialokasikan 90% untuk kabupaten/kota dan 10% untuk Propinsi (UU No.25/1999), juga menambah penerimaan daerah, yaitu dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan (Bagi Hasil, DAU, DAK).

Diawali dengan otonomi daerah yang dimulai 1 Januari 2001 serentak disetiap daerah. Pada tahun pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jawa Barat secara umum dari 20 kabupaten dan kota pada tahun 2000-2003 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini berkaitan dengan upaya pemerintah daerah mengoptimalkan peningkatan PAD dan perubahan dari bantuan daerah menjadi sistem dana perimbangan, untuk tiap daerah pertumbuhan tertinggi PAD pada tahun 2001 adalah Kabupaten Bekasi sebesar 132% sedangkan yang pertumbuhan terendah di Kabupaten Ciamis sebesar 32%.(Egie Prayogi, 2005).

2. Landasan Teori

Ada beberapa alasan bagi tingginya derajat sentralisasi keuangan di negara-negara berkembang diantaranya adalah : (Suparmoko, 2011)

- Lemahnya kemampuan administrasi ditingkat pemerintahan daerah
- Besarnya perbedaan situasi dan kondisi antardaerah
- Perlunya kekuasaan pusat yang kuat untuk mengurangi munculnya gerakan-gerakan sparatis, dan
- Perlunya perencanaan nasional yang menyeluruh baik di bidang pembangunan sosial maupun ekonomi termasuk penyediaan prasarana komunikasi, transportasi, irigasi, yang semuanya ini sangat vital bagi perkembangan ekonomi negara.

Pada tahun 1999, lahir Undang-undang No.22 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang menancapkan sistem otonomi daerah di Indonesia yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 2001. Dalam masa desentralisasi, Pemerintah Daerah didorong untuk menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar mungkin sehingga meminimumkan subsidi pemerintah pusat.

Pengeluaran Daerah merupakan salah satu instrumen perekonomian baik pusat maupun daerah ($Y = C + I + G$), maka terjadinya peningkatan PAD dan dana perimbangan akan mempengaruhi perekonomian. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan dapat digunakan sebagai penentu arah pembangunan di masa yang akan datang. Terjadinya peningkatan persentasi proporsi pada PAD dan dana perimbangan karena adanya penerimaan-penerimaan baru akibat dari desentralisasi fiskal, maka pos-pos penerimaan pemerintah daerah akan bertambah jumlahnya.

Dalam anggaran berimbang baik pemerintah pusat maupun daerah, pengeluaran pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah, bertambahnya penerimaan pemerintah berarti akan menambah pengeluaran pemerintah pula. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal selain jumlah pendapatan pajak bertambah porsi potensi pajak juga bertambah, dengan bertambahnya jumlah pajak maka akan mempengaruhi penerimaan Pemerintah Daerah dan akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah yang akan meningkat (Guritno, 2001). Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka Pendapatan

Domestik Regional Bruto suatu daerah tersebut juga akan meningkat.

Beberapa faktor penting yang akan terpenuhi jika desentralisasi fiskal berhasil dilaksanakan adalah efisiensi ekonomi, mobilitas dana, stabilitas makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup, efisiensi dan efektifitas pemerintah.

3. Metode Penelitian

3.1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dari tahun 2008 sampai tahun 2011, panel data yaitu gabungan antara *cross section* dengan *time series*.

Sumber data yang terdiri dari PDRB, PAD dan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan) berasal dari Biro Pusat Statistik dan Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

3.2. Metode Analisis dan Pengolahan Data

$$PDRB = f (PDRB, DP)$$

$$PDRB = a_0 + a_{it}PAD + a_{it}DP + e_{it}$$

Dimana :

PDRB = Pendapatan Domestik Regional Bruto 25 kabupaten/kota di Jawa Barat

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan

e = error term/gangguan

a_0 = konstanta

a_{it} = intersep

i = daerah

t = tahun

Pendekatan analisis yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh dari PAD

dan Transfer Pusat ke Daerah terhadap PDRB dan distribusi pendapatan di 25 kabupaten/Kota di Jawa Barat, yaitu melalui Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB dan PDRB per kapita.

Pada penelitian ini metode pengolahan data menggunakan model regresi panel data. Panel data merupakan sekumpulan data yang disusun berdasarkan sampel individual sepanjang waktu tertentu, dan kemudian ditunjukkan untuk multi observasi bagi setiap individu yang ada dalam sampel tersebut atau data silang tempat.

Dalam panel data terdapat empat jenis model panel, yaitu *Constant Coefficient Model*, Model LSDV (*least squares dummy variable*) atau *fixed effect*, *Error Coefficient Model* atau *Random Effect*, dan *Structural Equation Model*. Tetapi dalam mengestimasi model dan proses perhitungan ini akan menggunakan pendekatan *fixed effect* karena N lebih besar (25 kabupaten/kota) dari jumlah T (4 tahun) dan asumsi yang menjadi dasar analisis tidak berdasarkan random serta 25 kabupaten/kota yang menjadi data cross section pada penelitian ini bukan merupakan sampel, maka penelitian ini sesuai dengan syarat pertama dan syarat ketiga dimana FEM atau *fixed effect* lebih sesuai, dan teknik penaksiran menggunakan teknik GLS (*General Least Squares*).

4. Pembahasan Hasil

Estimasi Model Ekonometrika

Hasilestimasi model ekonometrika menggunakan *fix effect* menggunakan software Eview stampak pada lampiran makalah ini. Berikut adalah ikhtisar dari estimasi tersebut.

$$PDRB = 15305712 + 0,0408 PAD_{it} + 0,0056 DP_{it}$$

$$R^2 = 0,990148$$

$$F \text{ stat} = 457,61$$

(Prob F = 0,000)

$$DW \text{ stat} = 1,76$$

Keterangan :
PDRB : Produk Domestik Regional

Bruto
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DP : Dana Perimbangan

Sebelum makna ekonometria terhadap hasil estimasi tersebut dianalisis, terlebih dahulu akan diulas kebaikan model dari sisi ekonometrika. Ulasan tersebut adalah : (i) Alasan menggunakan *fix effect*, (ii) Review terhadap pelanggaran asumsi regresi linear klasik, (iii) Kebaikan Model.

Alasan Menggunakan *Fix Effect*

Gujarati (1995) menyarankan bahwa dalam suatu model data panel dengan jumlah T yang jauh lebih besar daripada jumlah n, metode estimasi *fix effect* lebih memadai digunakan daripada model *random effect*. Selain itu hasil estimasi model ini pun telah diuji apakah model *fix effect* lebih baik daripada *common effect*, sebagai berikut.

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: POOL01			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	127.572741	(24,73)	0.0000

Dengan argumentasi serta uji ini maka analisis selanjutnya akan didasarkan pada hasil estimasi data panel menggunakan *fix effect*.

Review terhadap Pelanggaran Asumsi Regresi Linear Klasik

Kolinearitas. Hasil estimasi yang diperoleh tidak mengindikasikan adanya kolinearitas dilihat dari statistik koefisien determinasi yang diperoleh sangat tinggi (lebih dari 90%), dan, signifikansi variabel bebas dalam model (*p values* sangat rendah).

Heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas jugatidak ditemukan dalam hasil estimasi karena *standard error* yang diperoleh telah dihitung dengan mempertimbangkan nyadengan metode White (*white cross section standard errors*).

Autokorelasi. Masalah autokorelasi tidak terindikasi karena nilai DW stat yang diperoleh sebesar 1,76. Beberapa pakar ekonometrika menganggap bahwa angka 1,76 (atau berada di kisaran 1,5 dan 2) berada cukup dekat dengan angka 2 sehingga dapat dinyatakan tidak ditemukan gejala autokorelasi yang berarti.

Kebaikan Model

Kebaikan Model (*Goodness of Fit*) sebenarnya adalah resume dari beberapa statistik yang dihasilkan dari estimasi model. Estimasi Model yang diperoleh dapat dikatakan baik (*fit*) dengan analisis sebagai berikut :

- Tidak ditemukannya gejala pelanggaran asumsi regresi linear klasik yang berarti
- Signifikansi Pengaruh Simultans yang tinggi (Prob F sangat rendah). Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) sudah cukup besar menjelaskan variabilitas dari PDRB.
- Signifikansi Pengaruh Parsial yang tinggi (Prob t koefisien PAD dan DP sangat rendah). Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) secara parsial berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari PAD dan DP terhadap PDRB Jawa Barat pada periode tahun 2008-2011. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan daerah di setiap kabupaten/kota akan berkembang dengan adanya PAD (pendapatan asli daerah) dan DP (Dana Perimbangan) atau transfer dari pusat ke daerah berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

6. Daftar Pustaka

Bambang Juanda dan Junaidi, *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*, IPB Press, Bogor, 2012

Biro Pusat Statistik, *Jawa Barat Dalam Angka*, 2012.

Egi Prayogi, *Pengaruh Penerapan Desentralisasi Fiskal Melalui PAD dan Transfer Pusat ke Daerah (Dana Perimbangan) Terhadap PDRB Kabupaten/Kotadi Jawa Barat Periode 1999-2003* (skripsi), Bandung, 2005.

Gujarati, Damodar N., *Basic Econometric*. 4th ed. McGraw-Hill Higher Education, USA, 2003.

Guritno Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta, 2001.

M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 2011.

Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika : Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan Eviews*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

Lampiran

Output Eviews 6

Dependent Variable: PDRB?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 08/15/13 Time: 08:25
 Sample: 2008 2011
 Included observations: 4
 Cross-sections included: 25
 Total pool (balanced) observations: 100
 Linear estimation after one-step weighting matrix
 White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)
 Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15305712	1176058.	13.01442	0.0000
PAD?	0.040832	0.004083	9.999538	0.0000
DP?	0.005610	0.001733	3.238038	0.0018
Fixed Effects (Cross)				
KABBGR-C	28731532			
KABSKM-C	-7858594.			
KABCJR-C	-8018644.			
KABB DG-C	13145154			
KABGRT-C	-2977250.			
KABTSM-C	-10715398			
KABCMS-C	-6513712.			
KABKNG-C	-13724636			
KABCRB-C	-8923079.			
KABMIK-C	-13258901			
KABSMD-C	-12312080			
KABIND-C	20895815			
KABSBG-C	-8823154.			
KABPWK-C	-6805797.			
KABKRW-C	23157584			
KABBKS-C	60004796			
KABKBB-C	-4650717.			
KOTBGR-C	-11685305			
KOTBKM-C	-18082557			
KOTBDG-C	35304236			
KOTCRB-C	-11182223			
KOTBKS-C	921994.6			
KOTDPK-C	-10503114			
KOTISM-C	-13734360			
KOTBJR-C	-16593680			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.993802	Mean dependent var	42691683
Adjusted R-squared	0.991730	S.D. dependent var	21889759
S.E. of regression	2530264.	Sum squared resid	4.67E+14
F-statistic	457.6136	Durbin-Watson stat	1.755826
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

